

# **The Impact of the Moratorium Policy on Fishery Companies (PT) in Sorong City**

## **Dampak Kebijakan Moratorium Terhadap Perusahaan (PT) Perikanan di Kota Sorong**

Arifin<sup>1\*</sup>, Roger. R. Tabalessy<sup>2</sup>, Tessa Rakian<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Perikanan, Universitas Kristen Papua Sorong, Jl.F. Kalasuat Sorong 94512, Papua Barat, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Pertanian, Program Studi Perikanan, Universitas Kristen Papua Sorong, Jl.F. Kalasuat Sorong 94512, Papua Barat, Indonesia  
e-mail: [sis\\_ifin@yahoo.com](mailto:sis_ifin@yahoo.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan moratorium terhadap operasional perusahaan (PT) perikanan di Kota Sorong dan untuk mengetahui kegiatan ekspor hasil perikanan khususnya komoditas ikan demersal dan udang. Kebijakan moratorium diberlakukan terhadap kapal berukuran besar diatas 30 GT, kapal yang pembangunannya di Luar negeri, kapal yang menggunakan alat tangkap pukat ikan serta pelarangan transshipment di tengah laut. Penelitian ini dilakukan di wilayah sorong dengan memilih instansi terkait yaitu dilakukan di satuan pengawasan PSDKP Sorong, Syahbandar perikanan Sorong serta perusahaan perikanan dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data yang berkaitan dengan objek penelitian yakni hal-hal yang menyangkut kegiatan operasional perusahaan dan kegiatan ekspor hasil perikanan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dampak dari kebijakan moratorium terhadap operasional perusahaan (PT) perikanan adalah terhentinya operasional perusahaan perikanan di wilayah Sorong, kegiatan ekspor hasil perikanan terhenti, terhentinya pembayaran retribusi ekspor hasil perikanan ke pemerintah daerah, terjadinya pemutusan hubungan kerja anak buah kapal, kegiatan bongkar muat di pelabuhan perikanan berkurang. Dampak dari kebijakan moratorium tidak menguntungkan bagi perusahaan (PT) perikanan, pendapatan retribusi daerah, mata pencaharian anak buah kapal serta buruh di pelabuhan perikanan Kota Sorong.

**Kata Kunci** : perusahaan, operasional, dampak, moratorium, Sorong

### **Abstract**

This study aims to determine the impact of the moratorium on the operational of (PT) fishery in Sorong and for export activities of fisheries, especially commodities demersal fish and shrimp. The moratorium imposed on large ships over 30 GT, ship construction abroad, boats that use trawling gear and replace the court transshipment at sea. This research conducted in the area of Sorong by selecting the relevant agencies are performed in the unit supervisor PSDKP Sorong, Syahbandar fisheries, and fishing companies to conduct interviews and collect data relating to the object of research that matters concerning the company's operations and activities of fishery product exports. Of the results of research conducted, the impact of the moratorium on the operation of (PT) fishery is the discontinuation of the company's operations in Sorong area, the export of fishery products stalled, stalled enlargement levy export fishery products to the local government, the termination of employment of the crew, activities loading and unloading in the fishing port decreases. The impact of the moratorium is not profitable for the company (PT) fishery, income levies, the livelihood of the crew and the fishing port of Sorong city workers.

**Keyword** : companies, operation, impact, moratorium, Sorong

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki posisi strategis sebagai negara maritim dengan garis pantai mencapai 95.000 Km dan lebih dari 17.504 pulau, menjadikannya memiliki potensi sumberdaya perikanan yang sangat besar dengan estimasi sekitar 6,26 juta ton per tahun yang dapat dikelola secara lestari. Namun, praktik *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing* telah mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan nasional secara masif, menyebabkan kerugian ekonomi yang mencapai Rp 101 triliun per tahun atau setara dengan USD 8,8 miliar (Leonardo & Deeb, 2022). Ancaman ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga degradasi ekosistem, berkurangnya stok ikan, dan mengurangi potensi ketenagakerjaan nasional dalam sektor perikanan (Ardhani, 2019). Perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715 yang meliputi Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor menjadi salah satu kawasan dengan intensitas IUU fishing tertinggi, di mana analisis data satelit Radarsat menunjukkan keberadaan 8.484 kapal ilegal per tahun dengan total kerugian mencapai USD 4,04 miliar.

Merespons permasalahan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia mengeluarkan serangkaian kebijakan moratorium pada November 2014 melalui Peraturan Menteri Nomor 56, 57, dan 58 tahun 2014, yang mencakup penghentian sementara perizinan kapal penangkap ikan berukuran di atas 30 GT, pelarangan transshipment di laut, dan pembatasan penggunaan kapal buatan luar negeri (Deswati et al., 2021). Kebijakan ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2015 yang melarang penggunaan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik. Implementasi kebijakan moratorium telah menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor perikanan, yang meningkat dari Rp 77 miliar pada 2015 menjadi Rp 491,18 miliar pada 2017 (Azhar et al., 2019). Namun, di sisi lain, studi empiris mengungkapkan kompleksitas dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan.

Penelitian di tingkat nasional menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita rumah tangga nelayan justru menurun sebesar Rp 80.988,25 akibat moratorium kapal asing, sementara durasi kerja meningkat 39-40 menit per hari, mengindikasikan bahwa rumah tangga nelayan tidak mendapatkan manfaat signifikan dari kebijakan tersebut (Joshua et al., 2023).

Kajian dampak moratorium telah dilakukan di beberapa lokasi, seperti Kota Bitung yang mengalami penghentian operasional perusahaan perikanan, penurunan kegiatan penangkapan di laut, kenaikan harga ikan, penurunan volume ekspor, dan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan buruh perikanan. Kebijakan pelarangan transshipment yang dimaksudkan untuk mencegah kapal mengirim ikan langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan Indonesia, justru menyebabkan banyak kapal tidak beroperasi karena tingginya biaya bahan bakar minyak (BBM) (Satria et al., 2018). Sementara itu, Susanto menemukan bahwa kebijakan moratorium mengakibatkan pergeseran tren penyerapan tenaga kerja lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan dan Kelautan, di mana sebagian besar perusahaan perikanan menghentikan operasionalnya, sehingga lulusan mengalami kesulitan mencapai karier yang baik di bidang ini (Susanto, 2021). Meskipun demikian, studi-studi tersebut masih terfokus pada wilayah Indonesia bagian barat dan tengah, sementara dampak kebijakan moratorium terhadap kawasan timur Indonesia, khususnya di Kota Sorong sebagai sentral perikanan tangkap wilayah timur, belum terdokumentasi secara komprehensif.

Kota Sorong memiliki peran strategis sebagai pusat aktivitas perikanan tangkap di Indonesia timur dengan infrastruktur lengkap yang meliputi galangan kapal, dermaga perikanan, Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Stasiun Karantina Ikan, dan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Wilayah ini menjadi basis operasional sembilan perusahaan perikanan berbadan hukum (PT) yang mengelola berbagai jenis armada, mulai dari pukat ikan, pukat udang, purse

seine, hingga pole and line. Namun, sejak implementasi kebijakan moratorium, terdapat indikasi kuat terjadinya gangguan operasional perusahaan, penurunan ekspor hasil perikanan, dan PHK massal terhadap Anak Buah Kapal (ABK). Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak multiplier terhadap ekonomi lokal, termasuk penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi ekspor, berkurangnya aktivitas bongkar muat di pelabuhan perikanan, serta menurunnya daya beli masyarakat yang bergantung pada industri perikanan.

Kesenjangan penelitian (research gap) teridentifikasi pada minimnya kajian empiris yang menganalisis dampak kebijakan moratorium terhadap operasional perusahaan perikanan di wilayah timur Indonesia, khususnya Kota Sorong. Studi-studi sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan makro atau terfokus pada wilayah Indonesia bagian barat, sehingga belum mampu menangkap dinamika lokal dan kompleksitas dampak di kawasan dengan karakteristik geografis, ekologis, dan sosial-ekonomi yang berbeda. Padahal, pemahaman mendalam tentang dampak kebijakan di tingkat lokal sangat krusial untuk merumuskan kebijakan perikanan yang lebih adaptif, kontekstual, dan berkeadilan, sekaligus menjaga keseimbangan antara pemberantasan IUU fishing dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dampak kebijakan moratorium terhadap operasional perusahaan perikanan di Kota Sorong, dengan fokus pada aspek: (1) perubahan aktivitas penangkapan dan ekspor hasil perikanan; (2) dampak terhadap tenaga kerja, khususnya PHK ABK dan karyawan; serta (3) implikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan. Kontribusi ilmiah (novelty) penelitian ini terletak pada penyediaan bukti empiris pertama yang mendokumentasikan dampak kebijakan moratorium di kawasan strategis perikanan tangkap Indonesia timur, menggunakan data primer dari instansi terkait dan perusahaan perikanan.

## BAHAN DAN METODE

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis dampak kebijakan moratorium terhadap operasional perusahaan perikanan di Kota Sorong. Penelitian dilaksanakan di wilayah Kota Sorong, khususnya di Satuan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sorong, Kantor Syahbandar Perikanan Sorong, dan perusahaan perikanan yang terdampak kebijakan moratorium.

Data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, meliputi pengelola perusahaan perikanan, anak buah kapal (ABK), karyawan perusahaan, dan nelayan yang terdampak kebijakan moratorium. Jumlah informan yang diwawancarai sebanyak sepuluh orang yang ditentukan berdasarkan rekomendasi dari perusahaan dan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berupa peraturan perundang-undangan terkait moratorium, data ekspor hasil perikanan (ikan demersal dan udang), data labuh sandar kapal di pelabuhan perikanan, serta data ketenagakerjaan sebelum dan sesudah pemberlakuan kebijakan moratorium.

Fokus analisis penelitian meliputi dampak kebijakan moratorium terhadap beberapa aspek, yaitu: (1) operasional perusahaan perikanan; (2) volume dan nilai ekspor hasil perikanan; (3) pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi ekspor dan labuh tambat kapal; serta (4) kondisi ketenagakerjaan sektor perikanan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan dan menginterpretasi temuan lapangan berdasarkan data yang terkumpul. Untuk mengukur dampak terhadap PAD, dilakukan perhitungan retribusi ekspor hasil perikanan menggunakan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yaitu 1% dari harga penjualan untuk komoditas udang dan 2% untuk komoditas

Tabel 1. Daftar perusahaan (PT) perikanan di Sorong

No	Nama Perusahaan	Jenis usaha	Jenis Alat Tangkap
1	PT. Minatam Mutiara	Penangkapan ikan	Pukat ikan
2	PT. Ombre Lines	Penangkapan Ikan	Pukat ikan
3	PT. ABBA	Penangkapan ikan	Pukat Ikan
4	PT. Amadeho	Penangkapan Ikan	Pursein
5	PT. Alfa Kurnia	Penangkapan Udang	Pukat Udang
6	PT. Dwi Bina Utama	Penangkapan Udang	Pukat Udang
7	PT. WIFI	Penangkapan Udang	Pukat Udang
8	PT. IMPD	Penangkapan Udang	Pukat Udang
9	PT. Citra Raja Ampat	Penangkapan & pengalengan ikan	Pole & Line

ikan lainnya, dikalikan dengan volume produksi dalam kilogram. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi kebijakan moratorium untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada masing-masing variabel yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Industri Perikanan di Sorong

Industri perikanan di wilayah Sorong khususnya di Kota Sorong sangat strategis dalam mengembangkan industri perikanan. Industri perikanan di kota Sorong berkembang dengan cepat dan sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta menjalankan roda perekonomian di Kota Sorong. Daftar perusahaan (PT) perikanan di Kota Sorong dapat dilihat pada tabel 1.

Dengan adanya perusahaan perikanan di Kota Sorong dan berkembang di wilayah Sorong, maka pemerintah daerah akan mendapatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah dan terbentuknya lapangan kerja. Perusahaan perikanan di Kota Sorong dapat berkembang dengan cepat, bahkan kegiatan penangkapan sampai kegiatan ekspor hasil perikanan dapat dilaksanakan di Kota Sorong. Pembangunan fasilitas untuk menunjang kegiatan usaha

perikanan di Kota Sorong sangat didukung dengan infrastruktur yang lengkap sehingga usaha perikanan dapat berjalan lancar mulai dari penangkapan, pengolahan, perijinan hingga kegiatan ekspor ke luar negeri. Fasilitas pendukung kegiatan operasional perusahaan perikanan di Kota Sorong dapat dilihat pada tabel 2. Dengan adanya fasilitas yang memadai dan lengkap, maka kegiatan usaha perikanan mulai dari penangkapan, pengolahan sampai kegiatan ekspor hasil perikanan dapat dilaksanakan di Kota Sorong

### Dampak Kebijakan

Sejak diberlakukan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada bulan Desember tahun 2014 yaitu moratorium kegiatan penangkapan ikan di seluruh wilayah Indonesia. Perusahaan perikanan di Kota Sorong mulai berdampak terhadap operasional perusahaan di mana kapal penangkapan ikan terhenti karena ijin tangkap tidak dapat diperpanjang/ di terbitkan. Dengan terhentinya kegiatan penangkapan ikan berdampak terhadap kegiatan perusahaan terganggu, perusahaan harus menanggung biaya akibat dari terhentinya penangkapan ikan tanpa diimbangi dengan pendapatan dengan melakukan ekspor ikan karena bahan baku tidak ada.

Tabel 2. Daftar fasilitas penunjang kegiatan operasional perusahaan

No	Fasilitas Penunjang	Uraian
1	Galangan Kapal	Perbaikan kapal
2	Dermaga perikanan	Kegiatan bongkar muat hasil perikanan dan kegiatan ekspor
3	Dermaga Umum	Kegiatan ekspor
4	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Pengujian mutu hasil tangkapan
5	Stasiun Karantina Ikan	Penerbitan dokumen ekspor (sertifikat mutu hasil perikanan)
6	Pangkalan PSDKP	Pengawasan perikanan
7	Syahbandar Perikanan	Penerbitan Ijin Berlayar kapal ikan
8	Kantor Bea dan Cukai	Penerbitan dokumen ekspor
9	Kantor kesehatan pelabuhan	Penerbitan dokumen kesehatan dan kebersihan kapal
10	Kantor Dinas perikanan kota Sorong	Penerbitan dokumen ekspor (Surat Keterangan Asal Ikan)
11	Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan	Penerbitan sertifikat kapal

Sumber: Data primer tahun 2016

Kebijakan pemerintah yang berdampak langsung dengan kegiatan operasional perusahaan sebagai berikut :

1. Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 57 tahun 2014 tentang moratorium yaitu penghentian sementara pemberian izin kapal penangkap ikan berukuran besar di wilayah Indonesia yang diterapkan pada kapal berkapasitas diatas 30 *gross tonnage* (GT)
2. Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 56 tahun 2014 tentang pelarangan transshipment atau alih muatan di tengah laut
3. Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 58 tahun 2014 yang didalam-nya mengatur tentang aparatur sipil Negara agar

menerapkan disiplin peraturan menteri nomor 56 dan nomor 57 tahun 2014

4. Peraturan menteri perikanan dan kelautan nomor 2 tahun 2015 tentang pelarangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) diwilayah pengelolaan perikanan Negara republik Indonesia.

Dengan berlakunya peraturan kelautan dan perikanan tersebut maka perusahaan perikanan di Kota Sorong berdampak langsung terhadap kegiatan operasional di mana kapal tidak dapat melakukan penangkapan ikan sehingga perusahaan tidak dapat melakukan ekspor ikan sehingga perusahaan tidak mampu menanggung beban yang terus bertambah yang harus di

Tabel 3 Daftar jumlah PHK ABK kapal

No	Nama perusahaan	Jumlah armada	Jenis alat tangkap	Jumlah ABK
1	PT. Minatama Mutiara	40 kapal	Pukat ikan	160
2	PT. Ombre Lines	36 kapal	Pukat ikan	144
3	PT. Abba	28 kapal	Pukat ikan	112
4	PT. Amadeho	6 kapal	Pursein	30
5	PT. Alfa Kurnia	9 kapal	Pukat udang	155
6	PT. Dwi Bina Utama	11 kapal	Pukat udang	133
7	PT. WIF/PT. IMPD	9 kapal	Pukat udang	156
<b>Jumlah</b>				<b>890</b>

Sumber : Kantor Syahbandar perikanan Kota Sorong dan perusahaan tahun 2016

tanggung. Dengan tidak berimbangnya pemasukan dan biaya yang mengakibatkan perusahaan harus mengambil kebijakan untuk bertahan yakni pemutusan hubungan kerja untuk Anak Buah Kapal (ABK) dan karyawan. Jumlah ABK terkena PHK pada perusahaan perikanan di Kota Sorong dapat dilihat pada tabel 3.

Dari Data ABK kapal yang terkena PHK dari beberapa perusahaan di kota Sorong sebanyak 890 jiwa. ABK yang terkena PHK tidak lagi bekerja di atas kapal, sedangkan kebutuhan keluarga harus tetap dipenuhi, sehingga ABK melakukan pekerjaan sampingan sambil menunggu kapal beroperasi lagi seperti bertani, berkebun, tukang ojek, buruh pabrik, nelayan tradisional dan sebagian besar kembali ke daerah masing-masing.

Dampak moratorium juga berdampak langsung terhadap kegiatan ekspor perusahaan terhenti, dan berakibat pada pendapatan retribusi daerah (PAD) juga terhenti.

**a. Data ekspor ikan dan hasil retribusi ekspor ikan**

Berikut ini grafik hasil ekspor hasil perikanan perusahaan sebelum dan sesudah moratorium sebagai berikut (Gambar 1).

Dari grafik Gambar 1 ekspor ikan dari tahun 2010 jumlah ekspor ikan yang dikirim langsung dari pelabuhan sorong mencapai 17.108.242 Kg, dan mengalami peningkatan hingga tahun 2012 yang mencapai 34.627.711 Kg. dan pada tahun 2013 hingga tahun 2014 jumlah ekspor ikan mengalami penurunan hingga 29.072.611 Kg, dan setelah kebijakan moratorium di berlakukan, kegiatan ekspor terhenti sehingga pada tahun

2015 kegiatan ekspor tahun 2015 nihil. Kegiatan ekspor ikan dari pelabuhan Sorong dari tahun 2010 hingga 2015 mencapai 134.947.362 Kg

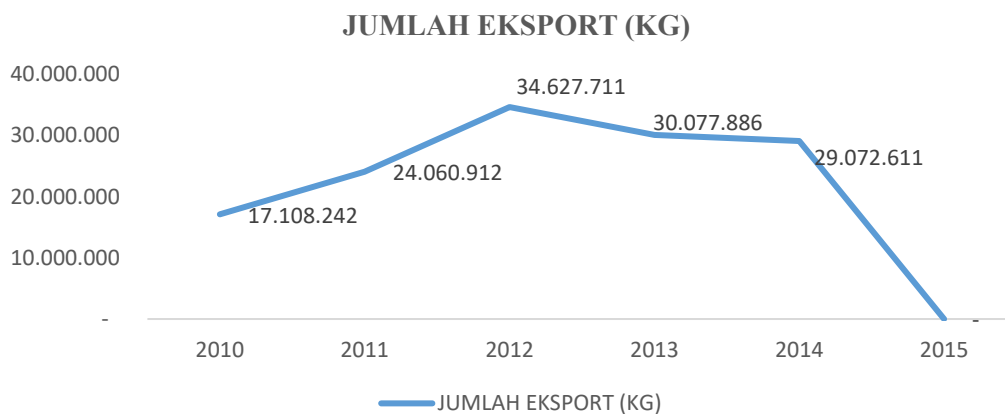
Dari diagram ekspor ikan (gambar 2) dari pelabuhan sorong dari tahun 2010 hingga tahun 2015 mencapai 134.947.362 Kg. kegiatan ekspor ikan dari tahun 2010 mencapai 13 % , tahun 2011 mencapai 18 % , tahun 2012 mencapai 26 % , tahun 2013 mencapai 22 % , tahun 2014 mencapai 21 % dan pada tahun 2015 kegiatan ekspor nihil karena tidak ada bahan baku.

Dari grafik retribusi ekspor ikan (gambar 3) dari tahun 2010 jumlah retribusi ekspor ikan yang dikirim langsung dari pelabuhan Sorong mencapai Rp.684,329,680 , dan mengalami peningkatan hingga tahun 2012 yang mencapai Rp.1,385,108,440. dan pada tahun 2013 hingga tahun 2014 jumlah retribusi ekspor ikan mengalami penurunan hingga Rp. 1,162,904,440, dan setelah kebijakan moratorium di berlakukan, kegiatan ekspor terhenti sehingga pada tahun 2015 kegiatan ekspor tahun 2015 nihil. Kegiatan ekspor ikan dari pelabuhan Sorong dari tahun 2010 hingga 2015 menghasilkan retribusi daerah sebesar Rp.5,361,895,500.

**b. Data ekspor udang dan hasil retribusi ekspor udang**

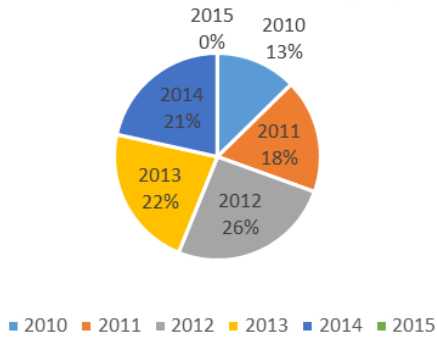
Berikut ini grafik hasil ekspor hasil perikanan perusahaan sebelum dan sesudah moratorium sebagai berikut.

Dari grafik ekspor udang (gambar 4) dari tahun 2011 jumlah ekspor udang yang dikirim langsung dari pelabuhan Sorong mencapai 1.215.591 Kg, dan mengalami penurunan pada tahun 2012 hingga 822.951

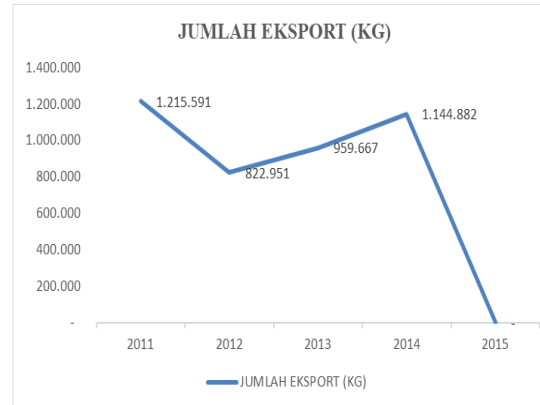


Gambar 1. Grafik jumlah produksi ekspor ikan

**JUMLAH EKSPORT (KG)**

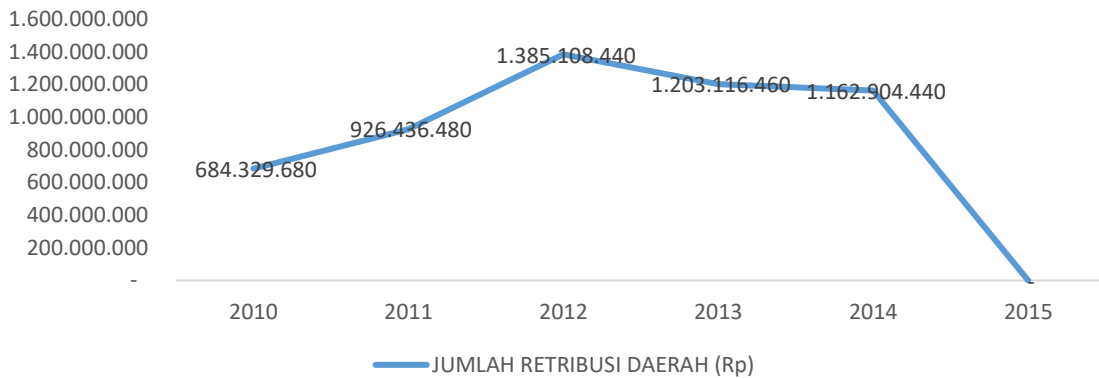


Gambar 2. Diagram jumlah produksi ekspor ikan



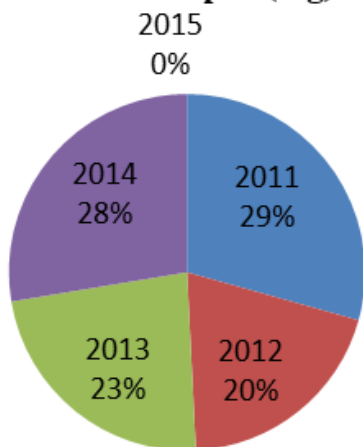
Gambar 4. Grafik jumlah ekspor udang

**JUMLAH RETRIBUSI DAERAH (Rp)**



Gambar 3. Grafik jumlah retribusi daerah dari ekspor ikan

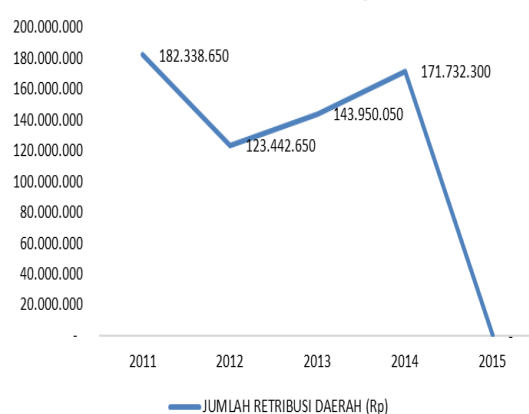
**Jumlah Ekspor (Kg)**



Gambar 5. Diagram jumlah ekspor udang

Kg. dan pada tahun 2013 hingga tahun 2014 jumlah ekspor udang mengalami peningkatan hingga mencapai 1.144.882 Kg, dan setelah kebijakan moratorium di berlakukan, kegiatan ekspor terhenti sehingga pada tahun

**Jumlah Retribusi Daerah (Rp)**



Gambar 6. Grafik jumlah retribusi daerah dari ekspor udang

2015 kegiatan ekspor tahun 2015 nihil. Kegiatan ekspor udang dari pelabuhan Sorong dari tahun 2010 hingga 2015 mencapai 4.143.091 Kg

Tabel 4. Daftar perusahaan (PT) perikanan terkena dampak moratorium

No	Nama Perusahaan	Tahun Terhenti	Status
1	PT. Minatama Mutiara	Awal tahun 2016	Tutup
2	PT. Ombre Lines	Tahun 2015	Tutup
3	PT. ABBA	Tahun 2015	Tutup
4	PT. Amadeho	Tahun 2015	Tutup
5	PT. Alfa kurnia	Tahun 2015	Tutup
7	PT. Dwi Bina Utama	Tahun 2016	Operasional terhenti

Dari diagram ekspor udang (gambar 5) dari pelabuhan sorong dari tahun 2011 hingga tahun 2015 mencapai 4.143.091 Kg. kegiatan ekspor udang dari tahun 2011 mencapai 29 %, tahun 2012 mencapai 20 %, tahun 2013 mencapai 23 %, tahun 2014 mencapai 28 dan pada tahun 2015 kegiatan ekspor nihil karena tidak ada bahan baku.

Dari grafik retribusi ekspor udang (gambar 6) dari tahun 2011 jumlah retribusi ekspor udang yang dikirim langsung dari pelabuhan sorong mencapai Rp.182,338,650 , dan mengalami penurunan pada tahun 2012 hingga Rp.123,442,650. dan pada tahun 2013 hingga tahun 2014 jumlah retribusi ekspor ikan mengalami peningkatan mencapai Rp. 171,732,300, dan setelah kebijakan moratorium di berlakukan, kegiatan ekspor terhenti sehingga pada tahun 2015 kegiatan ekspor tahun 2015 nihil. Kegiatan ekspor udang dari pelabuhan Sorong dari tahun 2010 hingga 2015 menghasilkan retribusi daerah mencapai Rp.621,463,650

Kegiatan ekspor hasil perikanan dari tahun 2010 hingga tahun 2014 terus berjalan dan pendapatan asli daerah tiap tahun juga terus meningkat hingga mencapai lebih dari 1 milyar per tahun. Namun dengan adanya kebijakan dari kementerian kelautan dan perikanan yakni moratorium ijin penangkapan ikan bagi kapal-kapal berukuran besar di atas 30 GT, dengan sendirinya ditahun 2015 PAD tidak lagi di bayarkan oleh perusahaan karena kegiatan ekspor hasil tangkapan terhenti.

Dengan terhentinya kegiatan penangkapan ikan dan kegiatan ekspor ikan/udang, maka perusahaan tidak mampu untuk menjalankan operasional perusahaan, kebijakan yang pertama yakni pemutusan hubungan kerja bagi ABK kapal dan pengurangan Karyawan perusahaan. Dengan adanya moratorium yang berlaku selama 6 bulan, perusahaan sempat bertahan untuk menunggu kebijakan yang baru agar

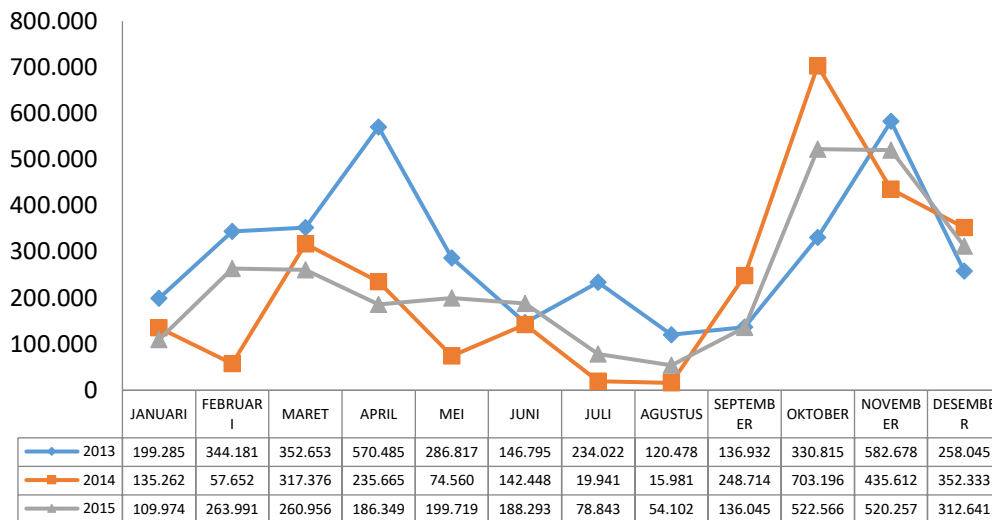
perusahaan tetap bisa jalan, namun setelah moratorium diperpanjang serta dikeluarkannya permen kementerian kelautan perikanan nomor 2 tahun 2015 tentang pelarangan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik, dengan sendirinya perusahaan perikanan yang alat tangkap ikan menggunakan alat tangkap tersebut, mengambil kebijakan dengan menutup kegiatan operasional perusahaan, karena tidak mampu lagi menanggung biaya operasional perusahaan yang semakin lama semakin besar. Daftar perusahaan yang mengalami penghentian operasional perusahaan (PT) perikanan di Kota Sorong dapat dilihat pada tabel 4.

Dengan terhentinya kegiatan operasional perusahaan perikanan bahkan perusahaan harus menutup usaha, di mana semua kapal-kapal penangkap ikan berlabuh di pelabuhan dan kolam bandar Sorong. Sebelum adanya kebijakan moratorium, kegiatan di pelabuhan perikanan Kota Sorong berjalan lancar, yakni kegiatan bongkar muat ikan hasil tangkapan, bongkar muat kebutuhan kapal dan ABK kapal. Dengan berkurangnya kegiatan bongkar muat di pelabuhan perikanan sorong, dengan sendirinya mata pencarian buruh di pelabuhan menurun. Dengan terhentinya operasional penangkapan ikan, berdampak langsung terhadap supplier sembako, petani, peternakan, pedagang pasar, dan lainnya.

#### **Dampak kebijakan Moratorium terhadap Nelayan lokal**

Dari hasil wawancara dengan petugas pelabuhan perikanan Sorong, di dapatkan informasi bahwa dengan adanya kebijakan moratorium dari kementerian kelautan dan perikanan sangat berpengaruh besar terhadap nelayan kecil khususnya kapal ikan dibawa 10 GT. Yakni hasil tangkapan mengalami peningkatan yang sangat tinggi hingga mencapai 100 %, dengan adanya peningkatan hasil tangkapan maka taraf hidup nelayan

**Jumlah Produksi Kapal Pole And Line Tahun 2013-2015**



Gambar 7. Grafik jumlah produksi kapal Pole & Line tahun 2013 – 2015

juga meningkat, dari data pelabuhan perikanan di sampaikan bahwa sebelum adanya moratorium hasil tangkapan nelayan 1 trip rata-rata hasil tangkapan 300 - 700 kg. dan setelah adanya moratorium hasil tangkapan ikan mencapai 2 ton per trip.

Untuk kapal di atas 50 – 70 GT, khususnya kapal pole & line yang berada di kota sorong, tidak berdampak besar, di mana hasil tangkapan kapal-kapal pole & line di kota sorong di mana hasil tangkapan sebelum adanya moratorium dan sesudah moratorium tidak mengalami peningkatan hasil tangkapan secara signifikan. Berikut ini grafik hasil penangkapan kapal ikan Pole & Line pada PT. Citra Raja Ampat Canning. Sebagai berikut gambar 7.

Dari grafik jumlah produksi kapal pole & line dari tahun 2013 hingga tahun 2015 jumlah produksi dari bulan Januari–Maret 2013 berkisar antara 199,285 Kg - 352,653Kg dan terus mengalami peningkatan produksi hingga bulan April 2013 hingga mencapai 570,485 Kg. dan kembali mengalami penurunan pada bulan Mei hingga bulan September 2013 dengan kisaran produksi antara 286,817 Kg – 136,932 Kg. pada bulan Oktober 2016 jumlah produksi kembali meningkat hingga bulan November 2013 hingga mencapai 582,678 Kg, dan kembali menurun pada bulan Desember 2013 hingga 258,045 Kg.

Jumlah produksi dari bulan Januari hingga bulan September 2014 berkisar antara

15,981 Kg – 317,376 Kg. dan pada bulan Oktober mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 703,196 Kg, dan pada bulan November hingga Desember 2014 mengalami penurunan hingga 352,641 Kg.

Jumlah produksi kapal pole & line pada tahun 2015 di mana kebijakan moratorium sudah diberlakukan bagi kapal berukuran besar. Jumlah produksi dari bulan Januari 2015 sampai September 2015 berkisar antara 54,102 Kg – 263,991 Kg. dan pada bulan Oktober dan November mengalami peningkatan produksi antara 520,257Kg – 522,566 Kg dan pada bulan Desember 2015 mengalami penurunan hingga 312 641 Kg.

Jumlah produksi pada tahun 2013 berjumlah 3.563.186 Kg, pada tahun 2014 jumlah produksi sebesar 2.738.740 Kg dan pada tahun 2015 jumlah produksi sebesar 2.833.736 Kg

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian dampak dari kebijakan moratorium terhadap operasional perusahaan (PT) perikanan sebagai berikut:

1. Terhentinya penangkapan ikan yang mengakibatkan perusahaan tidak mempunyai bahan baku untuk di ekspor
2. Berkurangnya penerimaan retribusi daerah khususnya retribusi ekspor hasil perikanan komoditas ikan dan udang beku dari perusahaan perikanan (PT)

3. Terjadi PHK ABK dan karyawan perusahaan, sebagian besar ABK dan Karyawan perusahaan beralih mata pencaharian sementara seperti bertani, berkebun, tukang ojek, buruh pabrik, nelayan tradisional dan sebagian besar kembali ke daerah masing-masing
4. Perusahaan perikanan berhenti beroperasi sebanyak 6 perusahaan dan 3 perusahaan masih menjalankan usahanya, dengan memanfaatkan kapal nelayan tradisional sebagai pemasok bahan baku.
5. Terhentinya operasional kapal penangkap ikan juga berdampak pada supplier sembako, petani, peternak, buruh pelabuhan perikanan.

#### **REFERENSI**

- Ardhani, H. A. (2019). Arah kebijakan pemerintah mengenai illegal unreported unregulated (IUU) fishing di indonesia. *Hukum Dan Masyarakat Madani*.
- Azhar, M., Ispriyarso, B., Saadah, N., Suharso, P., Juliani, H., Setyono, J., & Suparmin, S. (2019). State revenue of the fishery sector after the prohibition policy on illegal unreported and unregulated fishing. *IOP Conference Series: Earth and Environment*.
- Deswati, R. H., Muliawan, I., Yusuf, R., & Apriliani, T. (2021). Estimating socio economic impacts of re-enacting a permit policy for foreign-made fishing vessels. *IOP Conference Series: Earth and Environment*.
- Joshua, K., Gede, D., Wisana, K., Moratorium, D., Penangkap, K., Asing, I., Joshua., & Wisana, I. D. G. H. (2023). Dampak moratorium kapal penangkap ikan asing terhadap kesejahteraan nelayan di Indonesia. *Jurnal Agribisnis Indonesia*.
- Leonardo, A., & Deeb, N. (2022). Illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing in indonesia: Problems and solutions. *IOP Conference Series: Earth and Environment*.
- Satria, F., Sadiyah, L., Widodo, A., Wilcox, C., Ford, J. H., & Hardesty, B. D. (2018). Characterizing transshipment at-sea activities by longline and purse seine fisheries in response to recent policy changes in indonesia. Elsevier BV.
- Susanto, A. (2021). The impact of IUU fishing policy (moratorium license of fishery commerce) to the level of employment of maritime and fishery vocational schools graduates. *E3S Web of Conferences*.